

**PEREMPUAN PAPUA DAN MAS KAWIN;
SUATU TINJAUAN FEMINISME POSKOLONIAL**

SelfisinaTetelepta^a, Robby Sugara Sianipar^b, Sifra Parama^c

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

selfitetelepta@gmail.com^a, robygara13@gmail.com^b, sifraparama@gmail.com^c

Received: 05-08-2021/Accepted: 18-10-2021/Published: 31-12-2021

Abstrak

Tulisan ini menggunakan perspektif feminisme p oskolonial untuk memeriksa hubungan antara mas kawin dan kekerasan terhadap perempuan di Papua. Melalui studi kepustakaan, penelitian ini mengembangkan kajian yang berfokus pada studi-studi tentang feminisme poskolonial khususnya tentang kekerasan terhadap perempuan di Papua. Sementara itu, penelitian ini menemukan bahwa kekerasan terhadap perempuan memiliki relasi dengan tradisi mas kawin. Penafsiran tradisi ini menempatkan posisi laki-laki lebih superior dari pada perempuan, sehingga menciptakan budaya patriakhi. Pada praktiknya, berbagai kekerasan meliputi fisik, seksual dan, cultural tidak dapat terhindarkan. Pada akhirnya, studi ini belum menelisik lebih mendalam dari aspek hukum dan dampak psikologis dari perempuan-perempuan Papua yang mengalami kekerasan.

Kata-kata Kunci :FeminismePos kolonial; Perempuan Papua; Mas Kawin

Abstract

This paper uses the post-colonial perspectives of feminism to examine the correlation between dowry and violence on women in Papua. Through literature research, this study elaborates reading that concentrates on studies on post-colonial feminism, especially on violence on women in Papua. Meanwhile, this study discovered that violence against women has a relationship with the dowry tradition. The interpretation of this tradition places the position of men as superior more than women, consequently creating a patriarchal culture. In practice, several kinds of violence, including physical, sexual, and cultural, cannot be evaded. In the end, this study has not explored more deeply the law perspectives and the psychical impact of Papuan women who get the violence.

Keywords : Postcolonial Feminism; Papuan women; Dowry

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap Perempuan masih marak terjadi, sedangkan faktor yang menyebabkannya cukup beragam. Meskipun demikian, masa pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia sampai saat ini makin menunjukkan tindakan kekerasan kepada perempuan dalam rumah tangga. Pembatasan sosial selama pandemi yang juga berdampak kepada perekonomian, mengharuskan perempuan yang harus lebih keras berjuang di sektor domestik dan memastikan pendidikan anak-anak dari rumah¹. Secara umum, kekerasan terhadap perempuan kerap meliputi beberapa tindakan yakni secara fisik, psikis, dan seksual. Kekerasan fisik sering terjadi berupa pemukulan dan penganiayaan; secara psikis berupa kekerasan emosional dan verbal yang merusak mental perempuan; kekerasan seksual terjadi saat ada pemaksaan untuk melakukan hubungan seks atau adanya pemerkosaan dalam rumah tangga².

Studi ini mengembangkan kajian dalam lokus Papua yang ternyata telah merespon strategi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Misalnya Pemerintah Provinsi Papua telah mengaturnya melalui kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) No 8 tahun 2013 tentang perlindungan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Peraturan ini sekiranya memberikan harapan kepada korban untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia³. Meskipun telah ada kebijakan penanganan kekerasan kepada perempuan dalam rumah tangga sejak tahun 2013, data Komnas Perempuan menunjukkan Papua merupakan wilayah dengan jumlah terbanyak. Selain itu, penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (LIPIK), tahun 2017 terdapat 98 kasus dan tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 313 kasus⁴.

Peningkatan jumlah kasus kekerasan di Papua meliputi beberapa alasan, salah satunya, menurut Sendoh masih langgengnya budaya patriarki yang menciptakan dominasi laki-laki, khususnya berkaitan dengan mas kawin⁵. Tradisi mas kawin menjadi salah satu keadaan yang

¹Winda Ayu Fazraningtyas, Dini Rahmayani, and Indana Rahmah Fitriani, "Kejadian Kekerasan Pada Perempuan Selama Masa Pandemi COVID-19," *DINAMIKA KESEHATAN: JURNAL KEBIDANAN DAN KEPERAWATAN* 11, no. 1 (July 30, 2020): 362–71, <https://doi.org/10.33859/dksm.v11i1.550>.

²Marcheyla Sumera, "PERBUATAN KEKERASAN/PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN," *LEX ET SOCIETATIS* 1, no. 2 (2013); Kurnia Muhajarah, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga," *Sawwa* 11, no. 2 (2016): 127–46.

³Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Pemulihannya*. (Media Pressindo, 2018).

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/14/20133131/menurut-riset-ini-pemicu-kekerasan-terhadap-perempuan-di-papua>

⁵Gladys Sendoh, "REALITAS SIKLUS KEKERASAN TERHADAP ISTERI DI JEMAAT GKI KALVARI BHULEUBE." (Universitas Kristen Duta Wacana, 2019).

dapat melanggengkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan di Papua. Menurut Tekege, umumnya adat memiliki sudut pandang tertentu dalam membelenggu masyarakat Papua yang melanggengkan laki-laki menguasai perempuan⁶. Baginya, posisi perempuan mulai keluar dari sekat-sekat isolasi sejak kedatangan misi gereja. Meskipun demikian, konstruksi gender telah terinternaslisasi dalam lapisan kebudayaan yang lebih laten⁷.

Sementara itu, proses internalisasi yang mendalam telah menempatkan mas kawin sebagai salah satu hal yang penting dalam memahami kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa budaya patriarki yang dominan dalam kebudayaan telah menempatkan kekerasan ini terjadi⁸. Selain itu, mas kawin telah mengalami konstruksi sosial dan memastikan perempuan sebagai simbol transaksi⁹, yang pada praktiknya menyerahkan perempuan kepada laki-laki yang menandakan bahwa perempuan sudah sepenuhnya menjadi milik laki-laki¹⁰.

Walaupun banyak tulisan telah mengkaji makna tentang mas kawin dan dampaknya terhadap kekerasan dalam rumah tangga, namun beberapa tulisan belum menggunakan sudut pandang feminisme poskolonial. Pentingnya menggunakan sudut pandang feminisme poskolonial dalam tulisan ini bertujuan untuk membaca tradisi mas kawin dalam masyarakat Papua dan hubungannya dengan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Oleh karenanya, penelitian ini hendak memeriksa bagaimana memahami relasi antara mas kawin dan

⁶Petrus Tekege, *Perempuan Papua; Dulu, Sekarang, Dan Masa Depan Dalam Kehidupan Adat Dan Fenomena Pembangunan* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007).

⁷Muridan S. Widjojo, "Perempuan Papua Dan Peluang Politik Di Era Otsus Papua," *Masyarakat Indonesia*, 2012.

⁸Yanuarious You, "RELASI GENDER PATRIARKI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREMPUAN HUBULA SUKU DANI, KABUPATEN JAYAWIJAYA, PAPUA," *Sosiohumaniora* 21, no. 1 (2019), https://doi.org/10.24198/sosio_humaniora.v21i1.19335; E Sunarsih and S N Triani, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Novel Isinga: Roman Papua Karya Dorothea Rosa Herliany," *Diglosia: Jurnal Pendidikan, Kebahasaan ...*, 2020; Puji Retno Hardianingtyas, "Resistensi Perempuan Papua Di Lingkungannya Dalam Roman Isinga Karya Dorothea Rosa Herliany," *Aksara* 28, no. 2 (2016); Mochammad Wahyu Ghani, "Policy Paper: STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK UNTUK ORANG ASLI PAPUA (OAP) DI PROVINSI PAPUA BARAT.," *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 2020.

⁹Elisabeth Marit, "Noken Dan Perempuan Papua: Analisis Wacana Gender Dan Ideologi," *Melanesia*, 2016, <https://www.neliti.com/publications/236286/noken-dan-perempuan-papua-analisis-wacana-gender-dan-ideologi>; Maryanti E Mokoagouw, "Seminar Nasional Pemertahanan Bahasa Nusantara, 6 Mei 2010, Hotel Pandanaran Semarang.," in *PEMAKNAAN PEREMPUAN DI DALAM WACANA MOB PAPUA: KAJIAN SEMIOTIK*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), 197–206, <http://eprints.undip.ac.id/36921/>.

¹⁰Imelda Jaqualine Loppies, "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ADAT PERKAWINAN SUKU BIAK DI KAMPUNG YENDIDORI DISTRIK YENDIDORI KABUPATEN BIAK NUMFOR.," *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak* 14, no. 1 (2019): 1-11.

kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga melalui perspektif feminisme poskolonial.

METODE

Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan atau literatur. Penelitian kepustakaan mendasarkan data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku dan dokumen¹¹. Dalam penelitian kepustakaan akan dilakukan pengecekan terhadap keabsahan, benar tidaknya data yang diperoleh dari berbagai sumber baik buku, Dokumentasi, jurnal, surat kabar, artikel, maupun penelitian sebelum-sebelumnya¹². Pendekatan kualitatif digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya; menemukan makna atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi¹³.

HASIL DAN PEMBAHASAN

MEMAHAMI FEMINISME POSKOLONIAL

Poskolonial merupakan perlawanan terhadap wacana dan praktik kolonialisme dan imperialisme yang ada dalam negara '*dunia ketiga*'¹⁴. Sebagai bentuk perlawanan terhadap pengaruh dan ideologi kolonialisme, poskolonial memiliki tugas yang sangat panjang dan besar. Tujuan dari poskolonial adalah untuk menghancurkan pandangan atau gerakan yang dapat menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan. Sebagaimana pengertian poskolonial, gerakan ini mengacu pada kelompok atau individu yang mengalami penindasan dan sebagai usaha untuk memperoleh kebebasan atau kemerdekaan. Poskolonial hendak menggugat praktik kolonialisme yang telah melahirkan dan membentuk adanya kehidupan yang identik dengan rasisme, hubungan kekuasaan yang tidak seimbang dan adanya budaya diskriminasi yang terjadi secara sadar. Praktik kolonialisme lainnya yang hendak dihancurkan oleh poskolonial adalah dominasi dan subordinasi dalam sebuah hubungan yang terjadi antar kelompok dan dalam relasi gender. Dalam relasi gender, poskolonial menjadi bagian dari

¹¹Sutrisno Hadi, "Metodologi Research," *Universitas Gajah Madha*, 2014.

¹²John W Creswell, "Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches," *SAGE Publications*, 2007, <https://doi.org/10.4135/9781849208956>.

¹³A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan - Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd.* - Google Books, Prenada Media, 2016.

¹⁴Ania. Loomba, "Colonialism/Postcolonialism," *Forum for Modern Language Studies* 52, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.1093/fmls/cqv106>.

pemikiran dan perjuangan untuk melawan ketidakadilan yang terjadi kepada manusia, baik laki-laki atau perempuan.

Dalam tulisan ini, fokus poskolonial menjadi suatu upaya dilakukannya dekonstruksi terhadap praktik kolonial yang *meminggirkan* perempuan dan menganggap perempuan sebagai objek. Persoalan krusial yang menjadi bagian dari diskursus poskolonial adalah wacana tentang feminis dan gender. Dalam hal ini, kolonialisme yang hegemonik dan dominatif nampak dalam budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai subordinasi laki-laki. Bahkan dalam negara-negara *dunia ketiga*, perempuan mendapatkan perlakuan kolonisasi ganda, yaitu budaya dan perlakuan diskriminatif laki-laki. Dalam diskriminasi yang terjadi, terbentuklah pemahaman bahwa perempuan merupakan objek yang harus dikuasai, terlebih secara fisik.

Penindasan yang dialami oleh perempuan cenderung membuatnya menjadi kaum atau pihak yang kehilangan hak untuk berbicara atau untuk melakukan perlawanan. Gayatri Spivak mengungkapkan hal tersebut dengan konsep *subaltern*, yang merujuk pada orang atau kelompok yang lebih rendah. Dalam tulisannya, Spivak menjelaskan bahwa subaltern adalah kelompok yang terpinggirkan dan pihak yang dieksploitasi sebagai hak milik. Perempuan subaltern merujuk pada ketiadaan identitas dan status sosial, pembungkaman suara serta terputusnya mobilitas¹⁵. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tergambarlah bahwa perempuan mengalami penindasan berlipat.

Dengan adanya diskriminasi terhadap perempuan, maka yang dibutuhkan adalah perlawanan untuk kembali menyejajarkan atau menyetarakan status perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, dibutuhkan konsep atau pemahaman feminisme poskolonial. Feminisme poskolonial berusaha memukul balik hirarki gender, budaya atau ras untuk menolak adanya patriarki dan kolonialisme¹⁶. Feminisme poskolonial berfokus pada kehidupan perempuan, secara khusus dalam *dunia ketiga* yang dimarginalkan. Feminisme poskolonial dapat memasuki ranah budaya atau pun relasi yang diskriminatif untuk selanjutnya menciptakan dan membentuk perspektif yang baru, yaitu adanya kesetaraan antar manusia dan tidak adanya praktik kolonialisme yang berkelanjutan.

¹⁵Gayatri Chakravorty Spivak, "SUBALTERN STUDIES: DECONSTRUCTING HISTORIOGRAPHY," in *In Other Worlds*, 2020, <https://doi.org/10.4324/9780203441114-21>.

¹⁶Leela Gandhi, *Postcolonial Theory: A Critical Introduction*, *Postcolonial Theory: A Critical Introduction*, 2020, <https://doi.org/10.4324/9781003116714>.

PEREMPUAN PAPUA, TRADISI MAS KAWIN, DAN KEKERASAN; SUATU PEMBACAAN FEMINISME POSKOLONIAL

Tradisi mas kawin merupakan tradisi yang hampir dimiliki oleh semua daerah di Indonesia¹⁷, termasuk Papua. Pada dasarnya, mas kawin memiliki beberapa fungsi, antara lain; fungsi hukum dimana perkawinan akan diakui keabsahannya jika pihak laki-laki sudah memberikan mas kawin kepada pihak perempuan. Pemberian mas kawin juga akan membuat keluarga pihak laki-laki, sebagai pemberi mas kawin memiliki hak atas anak yang akan lahir. Selanjutnya, fungsi sosial yang mana melalui pemberian mas kawin, menandakan terikatnya pihak laki-laki dan perempuan menjadi satu keluarga¹⁸. Selain itu, mas kawin berfungsi juga sebagai tanda kedudukan dan martabat kedua belah pihak¹⁹. Bagi masyarakat di Papua, mas kawin juga menandakan penghargaan dan penghormatan kepada perempuan dan keluarganya serta sebagai sebuah *investasi* untuk menjaga kestabilan perkawinan.

Namun, dengan berjalannya waktu, budaya pembayaran mas kawin mengalami pergeseran makna²⁰. Pergeseran makna yang terjadi membuat fungsi mas kawin mengalami perubahan. Setidaknya terdapat lima makna yang bias dalam budaya mas kawin, antara lain; *Pertama*, untuk meningkatkan nilai ekonomi keluarga perempuan. Hal ini dikarenakan pihak keluarga laki-laki akan memberikan sejumlah harta (benda dan uang) yang dihitung oleh keluarga perempuan sesuai dengan pendidikan, kecantikan dan keperawanan. Jika perempuan memiliki pendidikan tinggi, kecantikan dan menikah dalam kondisi masih perawan maka keluarga perempuan akan memberikan harga yang tinggi kepada pihak laki-laki. *Kedua*, berdasarkan hal tersebut mas kawin ini kemudian menjadi beban bagi keluarga laki-laki yang akan menikahi perempuan. Tak jarang hal ini akan menimbulkan pertengkaran.

¹⁷Francisco Avelino Costa Laudasi, Yermia Djefri Manafe, and Yohanes K. N. Liliweri, "Transaksional Budaya Belis," *Jurnal Communio : Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi* 9, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.35508/jikom.v9i2.2493>; Y N Bora and N K Purawati, "Perkawinan Douna Uma Loka Masyarakat Desa Kalebu Ana Kaka, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat," *Social Studies*, 2019; Putu Eka Juliawati, "MOKO SEBAGAI MAS KAWIN (BELIS) PADA PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT ALOR," *Forum Arkeologi* 26, no. 3 (2013).

¹⁸Loppies, "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ADAT PERKAWINAN SUKU BIAK DI KAMPUNG YENDIDORI DISTRIK YENDIDORI KABUPATEN BIAK NUMFOR."

¹⁹F Ukur and FD Cooley, "*Benih Yang Tumbuh VIII: Suatu Survey Mengenai Gereja Kristen Irian Jaya.*" (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Studi Dewan Gerja-gereja di Indonesia., 1977).

²⁰Yosina Wospakrik, *Peranan Mas Kawin Dalam Perkawinan Adat Papua-Numfor* (Universitas Kristen Satya Wacana :Fakultas Teologi Press, 1999).

Ketiga, dalam pemberian mas kawin, nampak bahwa perempuan disejajarkan dengan barang. Berdasarkan konsep tersebut, mas kawin dapat dimaknai sebagai pengganti sosok perempuan dalam keluarganya. *Keempat*, pemberian mas kawin yang telah dibayar lunas, secara langsung akan memutus hubungan antara perempuan dan keluarganya. Saat perempuan telah dibayar lunas, laki-laki dapat menganggap diri sebagai yang dominan dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Jika hal ini terjadi, maka perempuan tidak boleh lari ke rumah orang tuanya dan tidak boleh dibantu oleh orang tuanya. *Kelima*, Mas kawin oleh keluarga perempuan akan menjadi peristiwa untuk meraih keuntungan. Mas kawin menandakan ganti rugi karena pihak laki-laki mengambil pihak perempuan²¹.

Pada posisi ini, peran perempuan Papua penting untuk dimaknai, bukan hanya sebagai simbol yang menerima mas kawin. Namun, memahami perempuan Papua tidak semudah itu. Menurut Muri dan Widjojo:

Memahami perempuan Papua dan representasinya dalam “kebudayaan Papua” bukanlah soal sederhana, mengingat Papua adalah terminologi yang tidak mengacu pada kelompok etnis tertentu tetapi pada suatu wilayah pulau besar di bagian barat yang berbatasan dengan Papua Nugini (PNG) di sebelah timur. Keragaman kelompok etnis/budaya sangat tinggi. Keragaman kelompok etnis/budaya sangat tinggi. Dari segi itu, Papua memiliki lebih dari sekitar 315 suku (BPS Provinsi Papua) atau kelompok etnis dengan bahasa dan budaya yang berbeda²².

Sementara itu, peran perempuan Papua dalam penelitian Marit menunjukkan bahwa peran mereka terbagi dalam beberapa aspek yaitu peran gender, peran reproduktif (domestik) dan peran produktif (publik)²³. Baginya, analisis terhadap perempuan perajut noken menempatkan posisi mereka untuk mampu secara produktif untuk mengembangkannya, sedangkan di sisi lain noken merupakan symbol representasi dari perempuan Papua secara kebudayaan²⁴. Meskipun peran perempuan Papua tampak produktif, di sisi lain tidak menghindarkan mereka dari kekerasan dalam rumah tangga, masalah kesehatan, dan percobaan pemerkosaan, misalnya dalam konteks perempuan Kamoro dan Muyu²⁵. Selain itu,

²¹Koentjaraningrat, “Bride-Price and Adoption in the Kinship Relations of the Bgu of West Irian,” *Ethnology* 5, no. 3 (1966), <https://doi.org/10.2307/3772769>.

²²Widjojo, “Perempuan Papua Dan Peluang Politik Di Era Otsus Papua.”

²³Marit, “Noken Dan Perempuan Papua: Analisis Wacana Gender Dan Ideologi.”

²⁴Alice Salhuteru and Fred Keith Hutubessy, “The Transformation of Noken Papua: Understanding the Dynamics of Noken’s Commodification as the Impact of UNESCO’s Heritage Recognition,” *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* 4, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.21580/jsw.2020.4.2.5569>.

²⁵Antie Solaiman, “Perempuan Dalam Masyarakat Papua: Suku Kamoro Dan Muyu,” *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.33541/ji.v1i2.906>.

relasi gender patriarki kepada perempuan Hubala di Suku Dani menunjukkan berbagai kekerasan baik secara fisik, seksual, ekonomi, psikis dan lain sebagainya mendominasi kehidupan mereka. Kekerasan-kekerasan ini juga menunjukkan adanya persoalan dengan mas kawin²⁶.

Perkawinan adat yang ditandai dengan sistem pembayaran mas kawin, menjadi ajang untuk menyetarakan perempuan dan barang, menimbulkan ketidakadilan dalam memperlakukan perempuan dan sebagai sarana meningkatkan nilai perekonomian. Selain itu, perempuan diposisikan sebagai komoditas²⁷. Dengan demikian, praktek budaya mas kawin telah membuat perempuan mengalami ketidakadilan dan kekerasan dalam relasi rumah tangga. Sementara itu, pengalaman-pengalaman yang ditunjukkan oleh korban mas kawin sangat beragam. Ada yang beranggapan bahwa tradisi ini harus terus berlangsung tanpa mempedulikan berbagai efek yang dapat terjadi. Ada pula pengalaman yang memberatkan tradisi mas kawin. Ada yang menerima berbagai dampak dari pembayaran mas kawin sebagai suatu keharusan walau mengalami penindasan. Pengalaman penindasan akibat mas kawin dapat dibagi menjadi dua. Penindasan secara fisik dan psikis. Penindasan secara fisik adalah bentuk kekerasan pukulan dan secara psikis adalah tekanan-tekanan batin yang dimiliki korban. Pergeseran makna mas kawin masyarakat di Papua, tidak hanya menyusahkan dan menindas perempuan tetapi juga laki-laki. Pergeseran makna ini secara tersirat menyamakan kedudukan perempuan dengan barang dan sejumlah uang serta memberi tekanan pada laki-laki sebagai pihak yang mengusahakannya.

Reaksi atau respons dari pergeseran makna dalam pembayaran mas kawin pun berbeda-beda. Ada pihak yang merasa bahwa tidak ada masalah dengan berbagai ketidakadilan dan kekerasan yang terjadi. Ada pihak yang menganggap bahwa budaya dan dampak dari budaya harus terus dilestarikan. Ada juga pihak yang menganggap budaya dan dampaknya sebagai sebuah kebanggaan. Akan tetapi, tidak sedikit juga yang terpaksa untuk menjalani budaya dan *membiarkan* pergeseran maknanya terus terjadi. Keterpaksaan yang dimiliki dalam menjalani budaya ini dikarenakan keluarga besar memegang peranan penting untuk mewajibkan pemberian mas kawin. Mas kawin dianggap sebagai sesuatu yang sangat mengikat dan menjadi hukum adat yang legal.

²⁶Marit, "Noken Dan Perempuan Papua: Analisis Wacana Gender Dan Ideologi"; Widjojo, "Perempuan Papua Dan Peluang Politik Di Era Otsus Papua"; You, "RELASI GENDER PATRIARKI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREMPUAN HUBULA SUKU DANI, KABUPATEN JAYAWIJAYA, PAPUA."

²⁷Hasrul Rahman, "DISKRIMINASI GENDER PEREMPUAN PAPUA DALAM NOVEL ISINGA KARYA DOROTHEA ROSA HERLIANY," *BAHAISTRA* 35, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.26555/bahastra.v35i2.4860>.

Mas kawin menjadi sesuatu yang mengikat karena proses penentuannya melalui pembicaraan keluarga besar. Rasa keterpaksaan ini biasa terjadi karena pemberi mas kawin tidak memiliki solusi lain untuk melanjutkan pernikahan. Selain itu, ada juga pihak yang sangat menikmati pemberian mas kawin ini. Kenikmatan dari mas kawin terjadi karena penerimanya mendapatkan harta demi kemajuan perekonomian dalam keluarga. Dengan kata lain, kenikmatan ekonomi yang tercipta dari pembayaran mas kawin dapat menimbulkan penindasan secara sadar. Penikmat mas kawin akan bersikap diam dan tidak peduli terhadap dampak yang ditimbulkan dari pergeseran makna budaya mas kawin.

Bila menelisik lebih mendalam konteks kekerasan terhadap Perempuan Papua, khususnya dalam rumah tangga melalui “kacamata” feminisme poskolonial, dominasi dan subordinasi dalam sebuah hubungan yang terjadi berkaitan erat dengan relasi gender, dan superioritas patriarki. Praktik-praktik ini telah meminggirkan perempuan dan menganggap perempuan sebagai objek. Budaya patriarki yang dominan menempatkan perempuan sebagai subordinasi laki-laki. Tertindasnya perempuan Papua akibat kekeliruan penafsiran budaya semakin menempatkan perempuan sebagai objek material dan juga melanggengkan kekerasan tetap terjadi.

Tradisi pembayaran mas kawin menciptakan diskriminasi tidak hanya bagi kaum perempuan tetapi dirasakan juga oleh kaum laki-laki dan keluarganya. Diskriminasi terhadap kaum perempuan dimulai saat pihak keluarga menentukan dan mengkalkulasikan *harga* yang akan diberikan kepada pihak laki-laki. Melalui cara ini ada tiga kemungkinan yang dapat terjadi. Kemungkinan pertama adalah keluarga laki-laki tetap mengusahakan barang atau uang yang diminta dan setelah itu perempuan dapat secara bebas diperlakukan termasuk mendapatkan kekerasan fisik dan psikis. Kemungkinan kedua adalah karena *harga* yang tinggi, tidak jadi melakukan perkawinan, perempuan atau laki-laki dapat mengalami gangguan psikis. Kemungkinan yang ketiga, terjadi penundaan perkawinan tetapi laki-laki dan perempuan tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan. Dalam kemungkinan yang ketiga, jika perempuan hamil dalam kondisi belum menikah, maka pihak laki-laki akan didesak untuk memberikan mas kawin dalam jumlah yang lebih besar.

Kemudian, diskriminasi yang dialami oleh kaum laki-laki terjadi karena adanya tekanan tentang harga dan desakan untuk membayar mas kawin dengan tuntas dan lunas. Laki-laki tertindas karena harus memenuhi tuntutan keluarga perempuan terkait dengan mas kawin yang akan diberikan. Tuntutan yang berlebihan akan diberikan sesuai dengan latar belakang yang dimiliki oleh perempuan. Dengan ini, laki-laki juga mempunyai dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah tetap mengusahakan mas kawin yang harus

diberikan dan merasa bebas untuk memperlakukan perempuan sebagai ganti dari tekanan yang ada. Sementara kemungkinan kedua adalah laki-laki juga dapat mengalami tekanan psikis karena desakan untuk memenuhi jumlah mas kawin. Dengan demikian, maka dapat dilihat bahwa tradisi ini menciptakan peluang adanya penindasan bagi orang-orang yang terlibat langsung di dalamnya.

Oleh karena adanya penindasan, maka budaya atau tradisi ini dapat diberi makna baru, bahwa perempuan bukanlah barang yang bisa ditukar atau dibeli. Bahkan perempuan tidak bisa disejajarkan dengan benda dan laki-laki memiliki kebebasan mencukupi permintaan sesuai kesanggupannya. Budaya pembayaran mas kawin dapat memberikan makna baru bahwa benda, uang dan material lainnya merupakan tanda atau simbol dari bentuk penghargaan dan rasa terimakasih kepada pihak keluarga sesuai kesanggupan dari *si* pemberi.

KESIMPULAN

Kajian ini berupaya untuk menampilkan betapa peran perempuan Papua tidak semata-mata sebagai objek material, namun perempuan memiliki posisi sebagai actor penting dalam mendukung keluarga dan juga mengembangkan dirinya untuk berguna dalam peradaban. Sementara itu, penelitian ini menemukan bahwa kebudayaan dan penafsirannya yang cenderung mendukung budaya patriarki, dan juga secara langsung membatasi posisi perempuan Papua. Oleh karenanya, untuk menghentikan segala bentuk diskriminasi ini, perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak seperti tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, agar sekiranya menampilkan wacana dan keberlanjutannya keranah praksis untuk menghentikan segala bentuk kekerasan khususnya kepada perempuan Papua agar mereka mampu mengembangkan diri dan menjadi setara di berbagai bidang.

KEPUSTAKAAN

Bora, Y N, and N K Purawati. "Perkawinan Douna Uma Loka Masyarakat Desa Kalebu Ana Kaka, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat." *Social Studies*, 2019.

Creswell, John W. "Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches." *SAGE Publications*, 2007. <https://doi.org/10.4135/9781849208956>.

Fazraningtyas, Winda Ayu, Dini Rahmayani, and Indana Rahmah Fitriani. "Kejadian Kekerasan Pada Perempuan Selama Masa Pandemi COVID-19." *DINAMIKA KESEHATAN: JURNAL KEBIDANAN DAN KEPERAWATAN* 11, no. 1 (July 30, 2020): 362–71. <https://doi.org/10.33859/dksm.v11i1.550>.

Gandhi, Leela. *Postcolonial Theory: A Critical Introduction*. *Postcolonial Theory: A Critical Introduction*, 2020. <https://doi.org/10.4324/9781003116714>.

Ghani, Mochammad Wahyu. "'Policy Paper: STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK UNTUK ORANG ASLI PAPUA (OAP) DI PROVINSI PAPUA BARAT.'" *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 2020.

Hadi, Sutrisno. "Metodologi Research." *Universitas Gajah Madha*, 2014.

Hardianingtyas, Puji Retno. "Resistensi Perempuan Papua Di Lingkungannya Dalam Roman Isinga Karya Dorothea Rosa Herliany." *Aksara* 28, no. 2 (2016).

Juliawati, Putu Eka. "MOKO SEBAGAI MAS KAWIN (BELIS) PADA PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT ALOR." *Forum Arkeologi* 26, no. 3 (2013).

Khaleed, Badriyah. *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Pemulihannya*. Media Pressindo, 2018.

Koentjaraningrat. "Bride-Price and Adoption in the Kinship Relations of the Bgu of West Irian." *Ethnology* 5, no. 3 (1966). <https://doi.org/10.2307/3772769>.

Laudasi, Fransisco Avelino Costa, Yermia Djefri Manafe, and Yohanes K. N. Liliwiri. "Transaksional Budaya Belis." *Jurnal Communio : Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi* 9, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.35508/jikom.v9i2.2493>.

Loomba, Ania. "Colonialism/Postcolonialism." *Forum for Modern Language Studies* 52, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.1093/fmls/cqv106>.

Loppies, Imelda Jaqualine. "'PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ADAT PERKAWINAN SUKU BIAK DI KAMPUNG YENDIDORI DISTRIK YENDIDORI KABUPATEN BIAK NUMFOR.'" *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak* 14, no. 1 (2019): 1-11.

Marit, Elisabeth. "Noken Dan Perempuan Papua: Analisis Wacana Gender Dan Ideologi." *Melanesia*, 2016. <https://www.neliti.com/publications/236286/noken-dan-perempuan-papua-analisis-wacana-gender-dan-ideologi>.

Mokoagouw, Maryanti E. "'Seminar Nasional Pemertahanan Bahasa Nusantara, 6 Mei 2010, Hotel Pandanaran Semarang.'" In *PEMAKNAAN PEREMPUAN DI DALAM WACANA MOB PAPUA: KAJIAN SEMIOTIK.*, 197–206. Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.

<http://eprints.undip.ac.id/36921/>.

Muhajarah, Kurnia. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga." *Sawwa* 11, no. 2 (2016): 127–46.

Rahman, Hasrul. "DISKRIMINASI GENDER PEREMPUAN PAPUA DALAM NOVEL ISINGA KARYA DOROTHEA ROSA HERLIANY." *BAHAISTRA* 35, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.26555/bahastra.v35i2.4860>.

Salhuteru, Alice, and Fred Keith Hutubessy. "The Transformation of Noken Papua: Understanding the Dynamics of Noken's Commodification as the Impact of UNESCO's Heritage Recognition." *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* 4, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.21580/jsw.2020.4.2.5569>.

Sendoh, Gladys. "REALITAS SIKLUS KEKERASAN TERDAHAP ISTERI DI JEMAAT GKI KALVARI BHULEUBE." Universitas Kristen Duta Wacana, 2019.

Solaiman, Antie. "Perempuan Dalam Masyarakat Papua: Suku Kamoro Dan Muyu." *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.33541/ji.v1i2.906>.

Spivak, Gayatri Chakravorty. "SUBALTERN STUDIES: DECONSTRUCTING HISTORIOGRAPHY." In *In Other Worlds*, 2020. <https://doi.org/10.4324/9780203441114-21>.

Sumera, Marcheyla. "PERBUATAN KEKERASAN/PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN." *LEX ET SOCIETATIS* 1, no. 2 (2013).

Sunarsih, E, and S N Triani. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Novel Isinga: Roman Papua Karya Dorothea Rosa Herliany." *Diglosia: Jurnal Pendidikan, Kebahasaan ...*, 2020.

Tekege, Petrus. *Perempuan Papua; Dulu, Sekarang, Dan Masa Depan Dalam Kehidupan Adat Dan Fenomena Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007.

Ukur, F, and FD Cooley. "*Benih Yang Tumbuh VIII: Suatu Survey Mengenai Gereja Kristen Irian Jaya*." Jakarta: Lembaga Penelitian dan Studi Dewan Gereja-gereja di Indonesia., 1977.

Widjojo, Muridan S. "Perempuan Papua Dan Peluang Politik Di Era Otsus Papua." *Masyarakat Indonesia*, 2012.

Wospakrik, Yosina. *Peranan Mas Kawin Dalam Perkawinan Adat Papua-Numfor*. Universitas Kristen Satya Wacana :Fakultas Teologi Press, 1999.

You, Yanuarious. "RELASI GENDER PATRIARKI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREMPUAN HUBULA SUKU DANI, KABUPATEN JAYAWIJAYA, PAPUA." *Sosiohumaniora* 21, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i1.19335>.

Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan - Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd. - Google Books. Prenada Media*, 2016.